

Pengelolaan Koperasi Unit Desa Tunas Mukti Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Dani Setiawan¹ Raden Imam Al Hafiz²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
danisetiawan@student.uir.ac.id radenimamalhafiz@soc.uir.ac.id

Received : July 29, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The aim of this research is to find out, analyze and explain, as well as supporting and inhibiting factors in the management of the Tunas Mukti Village Unit Cooperative in Sumber Jaya Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The research approach uses a descriptive type with qualitative methods. The data obtained comes from information from key informants and informants who have been determined. Data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation. The data obtained is compiled, sorted and analyzed in depth. The results of the research concluded that the management of KUD Tunas Mukti has been running well, so that through the business run by KUD Tunas Mukti it is able to improve the welfare of its members. These results can be seen from planning in the form of creating a work plan formula, work targets, and determining the results to be achieved. Organizing the management of KUD Tunas Mukti is carried out by determining the organizational structure, duties and functions of each section and placing people who have the ability to carry out organizational activities. Mobilization through the placement of cooperative administrators and managers according to their fields. Supervision within the organization has been carried out directly or indirectly. The inhibiting factors in the management of KUD Tunas Mukti come from internal factors, namely a lack of creativity in utilizing available funds and external factors.

Keywords: Management, KUD Tunas Mukti

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan, serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Koperasi Unit Desa Tunas Mukti di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan penelitian menggunakan tipe deskriptif dengan metode kualitatif. Data diperoleh berasal dari informasi key informan dan informan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh disusun, dipilah, dan dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan KUD Tunas Mukti telah berjalan dengan baik, sehingga melalui usaha yang dijalankan KUD Tunas Mukti mampu menyejahterakan anggota. Hasil ini dilihat dari perencanaan berupa membuat rumus rencana kerja, target kerja, dan menetapkan hasil yang hendak dicapai. Pengorganisasi dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti dijalankan dengan menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari masing-masing bagian serta menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Penggerakan melalui penempatan pengurus dan pengelola koperasi yang sesuai bidangnya. Pengawasan dalam organisasi telah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penghambat dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti berasal dari faktor internal yakni kurang kreatif dalam memanfaatkan dana yang tersedia dan eksternal yakni kurang maksimal memanfaatkan unit usaha.

Kata Kunci: Pengelolaan, KUD Tunas Mukti

Dani Setiawan dan Raden Imam Al Hafiz

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 / 2024

666

Pendahuluan

Keberadaan organisasi koperasi di Indonesia memiliki landasan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, tentang pokok-pokok perkoperasian dan disempurnakan lagi dengan UU Nomor 25 tahun 1992, sebagai soko guru perekonomian Indonesia bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).

Berbagai jenis Koperasi yang ada di Indonesia salah satunya adalah Koperasi Unit Desa (KUD) di mana keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (trust) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya (Sri Mulyani, 2021:83). Dalam hal ini kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya.

Saat ini terdapat sebanyak 127.846 unit koperasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai kategori. Salah satu daerah tersebut adalah Provinsi Riau dengan jumlah koperasi pada tahun 2022 sebanyak 3.248 unit koperasi yang aktif. Sebagian jumlah koperasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 210 unit yang salah satu ada di dalamnya adalah KUD Tunas Mukti.

KUD Tunas Mukti didirikan sejak tahun 2002 dan sampai saat ini telah memiliki 578 orang anggota yang terus berubah dari tahun ke tahun. Koperasi mampu tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya keaktifan anggota koperasi dan pengurus koperasi yang berkompeten dalam menjalankan aktivitas koperasi.

Pengurus KUD Tunas Mukti terdapat 2 orang pelindung dan penasehat, 3 orang badan pengawas koperasi, 5 orang pengurus koperasi dan dibantu oleh 10 orang karyawan yang menjalankan aktivitas administrasi serta usaha koperasi. Dalam menjalankan aktivitas yang telah disepakati pada koperasi ini, terdapat anggota yang jumlahnya cukup besar dan berfluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk itu dapat dijelaskan jumlah anggota pada tahun 2021 dan 2022 berikut ini:

Tabel 1

Jumlah KUD Tunas Mukti Desa Sumber Jaya

No	Keanggotaan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah anggota awal tahun	607	583
2	Jumlah anggota masuk	2	1
3	Jumlah anggota keluar	26	6
4	Jumlah anggota akhir tahun	583	578

Sumber: LPJ KUD Tunas Mukti, 2021 dan 2022.

Berdasarkan jumlah keanggotaan yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa dalam kurun 2 tahun ini yakni 2021 dan 2022 telah terjadi penurunan jumlah anggota. Di mana jumlah anggota keluar lebih besar di dibandingkan dengan jumlah anggota yang masuk,

sehingga hal ini secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktivitas usaha koperasi terutama pada akhir tahun yakni sisa hasil usaha (SHU). Masalah tersebut sesuai dengan penelitian yang dikemukakan Sonia Pratiwi (2023) bahwa perolehan SHU dalam suatu koperasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah anggota dan volume usaha. Jumlah anggota yang banyak tentunya akan mendorong SHU yang besar serta SHU juga dapat dipengaruhi dari perolehan volume usaha dalam suatu koperasi.

Kontribusi anggota dalam aktivitas koperasi sangat besar, sehingga adanya keluar masuk anggota yang besar akan berdampak pada usaha yang dijalankan koperasi secara umum. Di mana KUD Tunas Mukti memiliki beragam aktivitas usaha yang dijalankan untuk memperoleh penghasilan dan memanfaatkan tabungan anggota. Usaha yang dijalankan yakni simpan pinjam, kemitraan kebun sawit, waserba (mini Market), dan pengelolaan pasar rakyat.

Penelitian sebelumnya Sri (2015); Deasy, dkk. (2015) menyampaikan bahwa pertumbuhan anggota koperasi mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya, sehingga jumlah anggota yang aktif dalam melakukan simpanan pokok dan simpanan wajib memberi kontribusi bagi sisa hasil usaha bagi koperasi. Begitu juga penelitian yang dilakukan Maria Ira Susanti (2015) menyampaikan bahwa kesejahteraan anggota bisa terpenuhi bila SHU yang diperoleh tinggi. SHU yang besar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dengan didukung jumlah anggota yang terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni untuk mengetahui, menganalisis, faktor penghambat dan pendukung, serta menjelaskan pengelolaan Koperasi Unit Desa Tunas Mukti di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Siagian (2016;2) administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi bisa merupakan suatu seni dan ilmu, di mana administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti adanya sejumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Sedangkan menurut Bernard dalam Hamim (2015;8) administrasi adalah sistem tentang aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih suatu yang tidak terwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagian besar mengenal hal hubungan-hubungan. Dalam kegiatan apa saja, agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan secara efektif diperlukan pengaturan yang baik.

Atmosudirjo dalam Zulkifli (2015;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan sekaligus berlangsung di dalamnya.

Administrasi sebagai salah satu ilmu yang menjadi pendukung dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam masyarakat modern sebagian kegiatan-kegiatan para warganya dilangsungkan dalam organisasi modern.

Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo, 2017: 35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Kemudian menurut Pasolong (2017:8) administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Konsep Organisasi

Organisasi merupakan tempat berkumpul sekelompok orang untuk menjalin kesepakatan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Organisasi menurut Terry dalam Hamim (2015:24) adalah berasal dari kata "organism" yaitu struktur dengan bagian yang demikian di integrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan. Di mana organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Sedangkan pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian.

Sedangkan menurut Siagian (2016:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen terlihat apabila dilihat bahwa bergerak tidaknya organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung atas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dalam menggerakkan organisasi ke arah yang telah ditentukan.

Syafiie (2016:52-53) mengatakan organisasi publik adalah wadah atau tempat terselenggaranya administrasi yang didalamnya terjadi berbagai hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar. Terjadinya kerja sama dan pembagian tugas, berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing. Jadi organisasi publik adalah organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal sebagai birokrasi pemerintah.

Organisasi publik merupakan organisasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam menjalankan berbagai kepentingan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di semua tingkatan pemerintah.

Konsep Manajemen

Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2018:1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2018:1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Terry (2015;1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Pada dasarnya manajemen publik yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman dalam (Pasolong, 2017:83) mengatakan manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan fisik, informasi dan politik disisi lain.

Manajemen publik merupakan proses pengelolaan organisasi publik dengan menetapkan rencana, menyusun tugas dan fungsi, menggerakkan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sesuai perintah kebijakan publik, dan melakukan pengawasan yang melekat pada masing-masing tupoksi.

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Marwansyah (2014:3-4) manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karier, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Sedangkan menurut Kasmir (2016:25) Manajemen Sumber Daya Manusia ialah Proses pengelolaan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder.

Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia mulai dari perencanaan hingga pemberhentian sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu dalam pencapaian tujuan organisasi.

Konsep Pengelolaan

Nugroho (2013:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Menurut Terry (2015 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

- a. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

- b. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Pengelolaan koperasi dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar aktivitas koperasi berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan pada jenis usaha yang dijalankan serta mampu menumbuhkan kepercayaan anggota, sehingga permodalan koperasi terus bertambah dan tumbuh kembang usaha yang dijalankan semakin baik.

Konsep Koperasi

Menurut Baswir (2010:2) koperasi diartikan sebagai sekumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota);
- b. Koperasi produksi (menghasilkan barang bersama);
- c. Koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman)
- d. Koperasi Serba Usaha (campuran).

Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Koperasi primer (anggotanya masih perseorangan)
- b. Koperasi sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi)

Metode

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tipe deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) "Tunas Mukti" Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Informan dibedakan menjadi dua yakni informan dan key informan. Key informan yakni pengurus KUD Tunas Mukti (Ketua), sedangkan informan yakni badan pengawas, pengelola unit simpan pinjam, pengelola unit pasar, dan anggota KUD.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh berbentuk kalimat-kalimat dan aktivitas-aktivitas. Analisis data ini dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensi yaitu sesudah meninggalkan lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Koperasi Unit Desa Tunas Mukti di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

KUD Tunas Mukti adalah perkumpulan orang-orang yang tergabung dalam sebuah wadah dengan membentuk koperasi untuk menyalurkan kesamaan keinginan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan bersama. KUD Tunas Mukti menjadi wadah bagi masyarakat eks-trans yang berada di area Kota Baru Kabupaten Kuantan Singingi, sebagian besar eks-trans tersebut bekerja sebagai petani kelapa sawit, sehingga dengan adanya wadah berupa KUD ini mampu menjadi lembaga sebagai tempat gotong royong dalam bidang perekonomian masyarakat.

Pengelolaan adalah bentuk atau upaya yang dijalankan secara sistematis dan terukur dalam melaksanakan aktivitas koperasi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Pada penelitian ini pengelolaan menjadi tolak ukur utama yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

A. Perencanaan (Planning)

Perencanaan (Planning) dalam penelitian ini merupakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam mencapai hasil yang hendak dicapai pada masa mendatang. Perencanaan ialah langkah awal yang dirumuskan KUD Tunas Mukti dalam menjalankan usahanya, untuk memberikan kesejahteraan dan keuntungan kepada seluruh anggota koperasi. Untuk itu dalam indikator perencanaan ini ditetapkan 2 (dua) dimensi yakni membuat rencana kerja dan menetapkan hasil yang hendak dicapai.

1). Membuat rencana kerja

Membuat rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilalui sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk itu dalam membuat rencana

kerja tentunya melibatkan semua komponen penting dalam organisasi, agar memudahkan dalam mencapainya.

Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai membuat rencana kerja memberikan pernyataan bahwa: Pengurus KUD telah membuat rencana kerja tahunan dengan bentuk rencana yakni mengelola 4 unit usaha yang ada (unit KKPA, Simpan Pinjam, Waserda, dan Pasar). Untuk membuat rencana kerja telah melibatkan semua pengurus koperasi (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Pengurus KUD Tunas Mukti telah merumuskan dan menetapkan rencana kerja tahunan yang disampaikan pada setiap rapat anggota tahunannya. Semua rencana kerja disampaikan secara kolektif oleh ketua KUD Tunas Mukti kepada seluruh anggota koperasi. Rencana kerja telah ditetapkan dan dibuat mewakili semua unit usaha yang ada dalam KUD Tunas Mukti, sehingga semua perencanaan yang ada dapat menunjukkan solusi dan langkah yang diterapkan untuk memperoleh keuntungan dan mengantisipasi kerugian usaha.

Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti mengenai membuat rencana kerja memberikan pernyataan bahwa: Pengurus KUD telah membuat rencana kerja tahunan, rencana kerja yang ditetapkan pengurus yakni adanya bantuan sosial, lembaga pendidikan dan keagamaan. Rencana kerja KUD dirumuskan dan ditetapkan oleh pengurus KUD, Badan Pengawas, dan Perangkat Desa (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Pengurus KUD Tunas Mukti telah membuat rencana kerja tahunan. Rencana kerja dirumuskan oleh pengurus dan disepakati atau disetujui oleh semua anggota koperasi pada waktu rapat anggota tahunan. Beragam jenis rencana kerja yang ditetapkan, mulai dari rencana kerja masing-masing unit usaha untuk memperoleh keuntungan dan mengantisipasi kerugian, program bantuan-bantuan sosial, dan rencana kerja lainnya untuk kemajuan koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan jelaslah bahwa ada rencana kerja yang ditetapkan pengurus KUD Tunas Mukti setiap tahunnya. Rencana kerja yang paling peneliti soroti adalah langkah untuk mengurangi kerugian yang ada pada unit pasar dengan cara melakukan pengembangan tempat usaha (membuat lapak-lapak baru) dan memperluas lahan parkir, serta melakukan subsidi silang dari unit lainnya untuk membantu keuangan unit pasar. Unit pasar mengalami kerugian yang disampaikan dalam laporan keuangannya dikarenakan adanya beban pinjaman hutang bank yang harus dibayar Rp.100.000.000,- per tahun selama masa 4 tahun atas pembangunan pasar, sehingga pendapatan unit pasar dibebani beban hutang yang besar dan menyebabkan kerugian. Secara usaha unit pasar jika tanpa ada beban hutang memiliki potensi keuntungan yang cukup besar.

2). Menetapkan hasil yang hendak dicapai

Menetapkan hasil yang hendak dicapai merupakan langkah perencanaan selanjutnya setelah menetapkan rencana kerja, sehingga rencana kerja yang dibuat dapat memiliki tolak ukur yang jelas dalam pelaksanaannya dan pencapaian hasil kerja pada akhir periode.

Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai menetapkan hasil yang hendak dicapai memberikan pernyataan bahwa: Hasil yang hendak dicapai dalam menjalankan KUD setiap tahunnya adalah sisa hasil usaha dan laba keuntungan, sehingga semua anggota koperasi dapat tersejahterakan dengan adanya SHU dan juga membuat koperasi menjadi semakin besar (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Semua rencana kerja yang sudah ditetapkan memiliki tujuan dan target yang hendak dicapai. Hasil yang hendak dicapai dalam menjalankan KUD setiap tahunnya adalah sisa hasil usaha dan laba keuntungan, sehingga semua anggota koperasi dapat tersejahterakan dengan adanya SHU dan juga membuat koperasi menjadi semakin besar.

Wawancara dengan Nur Widiya Saputra selaku pengelola unit Simpan Pinjam KUD Tunas Mukti mengenai menetapkan hasil yang hendak dicapai memberikan pernyataan bahwa: Target yang hendak dicapai dari rencana kerja KUD yakni mengelola unit usaha. Hasil yang hendak dicapai sesuai target rencana kerja telah ditetapkan (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Rencana kerja telah ditetapkan target yang hendak dicapai oleh setiap jenis atau bentuk kegiatan maupun program. Target yang hendak dicapai dari rencana kerja KUD yakni mengelola unit usaha dengan baik dan memperoleh keuntungan. Hasil yang hendak dicapai sesuai target rencana kerja telah ditetapkan, sehingga pada unit usaha simpan pinjam menetapkan target keaktifan anggota dalam membayar pinjaman dan simpanan pokok pada tahun berjalan di atas 90%.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan serta dokumentasi yang peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan yang dilakukan dengan membuat rumus rencana kerja, target kerja, dan menetapkan hasil yang hendak dicapai dalam setiap tahunnya. Dengan demikian dari indikator perencanaan dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan dengan baik yakni membuat dan menetapkan perencanaan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (Organizing) dalam penelitian ini membuat struktur organisasi yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan, sehingga terjalannya koordinasi dalam mengelola usaha KUD. Pengorganisasi sangat penting dimiliki oleh sebuah organisasi,

sehingga sebuah organisasi harus memiliki struktur sebagai garis komando dan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai sebuah organisasi.

1). Struktur organisasi

Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai struktur organisasi memberikan pernyataan bahwa: Struktur organisasi yang disepakati dalam KUD ini yakni Badan Pelindung, Badan Pengawas, Pengurus KUD, dan pegawai. Struktur organisasi ini ditetapkan oleh Badan Pengawas KUD. Tujuan dari struktur ini untuk memudahkan koordinasi dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Tanggapan di atas menerangkan bahwa dalam mengelola KUD Tunas Mukti telah ditetapkan struktur organisasi yang disepakati dalam KUD ini yakni Badan Pelindung, Badan Pengawas, Pengurus KUD, dan pegawai. Struktur organisasi ini ditetapkan oleh Badan Pengawas KUD. Tujuan dari struktur ini untuk memudahkan koordinasi dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti.

Begitu juga hasil wawancara dengan Mulyono selaku pengelola unit Pasar KUD Tunas Mukti mengenai membuat struktur organisasi memberikan pernyataan bahwa: Jenis struktur organisasi yang disepakati pada KUD Tunas Mukti terdiri dari Badan Pelindung, Badan Pengawas, Pengurus Koperasi, Karyawan, dan anggota koperasi. Dalam pembentukan struktur organisasi dilakukan oleh Badan pengawas dan pengurus koperasi. Pembentukan struktur organisasi sangat penting agar dapat mempermudah jalannya operasional koperasi. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Dalam pengelolaan koperasi telah ada struktur organisasi yang ditetapkan. Jenis struktur organisasi yang disepakati pada KUD Tunas Mukti terdiri dari Badan Pelindung, Badan Pengawas, Pengurus Koperasi, Karyawan, dan anggota koperasi. Dalam pembentukan struktur organisasi dilakukan oleh Badan pengawas dan pengurus koperasi. Pembentukan struktur organisasi sangat penting agar dapat mempermudah jalannya operasional koperasi. Khusus unit pasar pengurusnya terdiri dari ketua unit pasar, administrasi pasar, dan pengelola pasar.

Dengan demikian dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah ditetapkan struktur organisasi sebagai salah satu langkah untuk menjalankan usaha koperasi dalam mencapai tujuan yang disepakati. Struktur organisasi yang ada dalam KUD Tunas Mukti ini terdiri dari badan pelindung, badan pengawas, pengurus koperasi terdiri dari karyawan dan unit-unit usaha, kemudian terakhir yang memiliki peranan yang paling besar adalah anggota.

2). Pembagian tugas

Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai pembagian tugas memberikan pernyataan bahwa: Pembagian tugas dalam kepengurusan KUD Tunas Mukti telah sesuai dengan jabatan masing-masing pengurus. Semua tugas disesuaikan dengan struktur organisasi yang ditetapkan (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti, masing-masing struktur organisasi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian tugas dalam kepengurusan KUD Tunas Mukti telah sesuai dengan jabatan masing-masing pengurus. Semua tugas disesuaikan dengan struktur organisasi yang ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti mengenai pembagian tugas memberikan pernyataan bahwa: Pembagian tugas dalam kepengurusan KUD Tunas Mukti telah sesuai dengan jabatan masing-masing pengurus. Semua tugas disesuaikan dengan struktur organisasi yang ditetapkan (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

KUD Tunas Mukti telah ditetapkan tugas dan fungsi masing-masing bagian seperti badan pelindung, badan pengawas, pengurus, dan unit usaha. Pembagian tugas dalam kepengurusan KUD Tunas Mukti telah sesuai dengan jabatan masing-masing pengurus. Semua tugas disesuaikan dengan struktur organisasi yang ditetapkan.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dibentuk struktur organisasi dan masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan jenis dan unit kerjanya. Adanya penetapan tugas dan fungsi ini sebagai pedoman bagi masing-masing bagian menjalankan aktivitasnya, sehingga semua aktivitas berjalan dalam koridor yang benar sesuai dengan yang telah disepakati dalam tugas dan fungsi yang ada.

3). Kejelasan fungsi

Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai kejelasan fungsi memberikan pernyataan bahwa: Kejelasan fungsi dari masing-masing bagian yang ada dalam KUD Tunas Mukti agar unit usaha berjalan dengan sesuai rencana kerja. Semua pengurus akan bertanggungjawab kepada seluruh anggota koperasi (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

KUD Tunas Mukti telah ada fungsi dari masing-masing bagian dengan jelas. Kejelasan fungsi dari masing-masing bagian yang ada dalam KUD Tunas Mukti agar unit usaha berjalan dengan sesuai rencana kerja. Semua pengurus akan bertanggungjawab kepada seluruh anggota koperasi.

Wawancara dengan Nur Widiya Saputra selaku pengelola unit Simpan Pinjam KUD Tunas Mukti mengenai struktur organisasi memberikan pernyataan bahwa: Kejelasan fungsi dari masing-masing struktur pada KUD Tunas Mukti agar unit usaha berjalan

sesuai rencana kerja. Pertanggungjawaban atas pengelolaan koperasi yang dijalankan disampaikan kepada semua anggota koperasi. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

KUD Tunas Mukti telah ditetapkan fungsi dari masing-masing bagian. Kejelasan fungsi dari masing-masing struktur pada KUD Tunas Mukti agar unit usaha berjalan sesuai rencana kerja. Pertanggungjawaban atas pengelolaan koperasi yang dijalankan disampaikan kepada semua anggota koperasi. Untuk unit simpan pinjam memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada anggota dalam melakukan simpanan dan memperoleh pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah menetapkan pengorganisasian. Pengorganisasian yang dilakukan dengan membuat struktur organisasi, menetapkan tugas, dan menetapkan fungsi, sehingga semua bagian yang ada dalam koperasi dalam bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan organisasi akan berjalan dengan harmonis. Dengan demikian dari indikator pengorganisasi dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan dengan baik yakni dengan menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari masing-masing bagian serta menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas organisasi.

c. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan (Actuating) dalam penelitian ini adalah penempatan pengurus atau pengelola yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya dan melaksanakan tugas sesuai wewenang yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

1). Penempatan pengelola sesuai kemampuan

Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai penempatan pengelola sesuai kemampuan memberikan pernyataan bahwa: KUD Tunas Mukti telah tersedia SDM untuk mengelola semua unit usaha (KKPA, Simpan Pinjam, Waserda, Pasar). Penempatan karyawan disesuaikan kebutuhan masing-masing unit, sehingga dapat membantu kegiatan usaha sesuai kemampuan di bidang masing-masing. Untuk kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha sudah sangat baik. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Semua pengelola yang ada di KUD ditempatkan sesuai kemampuannya. KUD Tunas Mukti telah tersedia SDM untuk mengelola semua unit usaha (KKPA, Simpan Pinjam, Waserda, Pasar). Penempatan karyawan disesuaikan kebutuhan masing-masing unit, sehingga dapat membantu kegiatan usaha sesuai kemampuan di bidang masing-masing. Untuk kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha sudah sangat baik.

Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti mengenai penempatan pengelola sesuai kemampuan memberikan pernyataan bahwa:

KUD Tunas Mukti telah tersedia SDM yang sesuai standar yang siap untuk mengelola semua unit usaha (KKPA, Simpan Pinjam, Waserda, Pasar). Semua pengelola unit ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Alasan penempatan seseorang dalam unit koperasi yakni untuk membantu kelancaran kegiatan usaha sesuai kemampuan dibidangnya. Saat ini kemampuan pengelola usaha telah berjalan sesuai kebutuhan. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

KUD Tunas Mukti telah menempatkan pengelola masing-masing unit usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. KUD Tunas Mukti telah tersedia SDM yang sesuai standar yang siap untuk mengelola semua unit usaha (KKPA, Simpan Pinjam, Waserda, Pasar). Semua pengelola unit ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Alasan penempatan seseorang dalam unit koperasi yakni untuk membantu kelancaran kegiatan usaha sesuai kemampuan dibidangnya. Saat ini kemampuan pengelola usaha telah berjalan sesuai kebutuhan.

Sementara dari hasil wawancara dengan 4 (empat) orang anggota KUD Tunas Mukti yakni Diwono, Rahmad, Rosun, dan Darobi dapat dirangkum mengenai penempatan pengelola sesuai kemampuan yakni: Sejauh ini pengelola KUD Tunas Mukti dilihat dari pengurus maupun pengelola unit usaha telah bekerja dengan baik. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Dengan demikian dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah menempatkan karyawan dan pengelola pada masing-masing unit usaha yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang yang dimilikinya, sehingga diharapkan mampu mendukung aktivitas masing-masing unit usaha dalam memperoleh keuntungan dan mendapatkan penghasilan yang maksimal.

2). Aktivitas pengelolaan usaha sesuai rencana

Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai aktivitas pengelola usaha sesuai rencana memberikan pernyataan bahwa: Aktivitas KUD Tunas Mukti pada intinya memberikan pelayanan kepada anggota. Semua aktivitas telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagai rencana kerja yang sudah ditetapkan (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Pengelolaan KUD Tunas Mukti berjalan sesuai rencana kerja yang ditetapkan. Aktivitas KUD Tunas Mukti pada intinya memberikan pelayanan kepada anggota. Semua aktivitas telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagai rencana kerja yang sudah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti mengenai aktivitas pengelola usaha sesuai rencana memberikan pernyataan bahwa: Aktivitas yang dijalankan pengelola usaha yang ada dalam KUD Tunas Mukti ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada semua anggota. Aktivitas yang

dijalankan pengelola usaha telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Pengelolaan usaha berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, sehingga aktivitas koperasi berjalan sebagaimana diharapkan. Aktivitas yang dijalankan pengelola usaha yang ada dalam KUD Tunas Mukti ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada semua anggota. Aktivitas yang dijalankan pengelola usaha telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dengan demikian aktivitas KUD Tunas Mukti berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Di mana masing-masing unit usaha beraktivitas sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga pencapaian rencana kerja yang disepakati dapat dipenuhi dan pencapaian target dapat terealisasi serta memberikan keuntungan bagi KUD Tunas Mukti.

3). Koordinasi antar lini

Hasil wawancara dengan Purboyono selaku ketua KUD Tunas Mukti mengenai koordinasi antar lini memberikan pernyataan bahwa: Koordinasi KUD Tunas Mukti antar lininya dalam menjalankan usaha di komandoi oleh sekretaris. Ini memungkinkan untuk terjalannya komunikasi langsung dengan semua bagian KUD. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Koordinasi antar lini dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Koordinasi KUD Tunas Mukti antar lininya dalam menjalankan usaha di komandoi oleh sekretaris. Ini memungkinkan untuk terjalannya komunikasi langsung dengan semua bagian KUD.

Wawancara dengan Nur Widiya Saputra selaku pengelola unit Simpan Pinjam KUD Tunas Mukti mengenai koordinasi antar lini memberikan pernyataan bahwa: Koordinasi antar lini dalam KUD Tunas Mukti baik antar pengelola usaha dengan pengurus maupun dengan badan pengawas sudah berjalan sesuai dengan diharapkan. Koordinasi ini dibawah kendali sekretaris KUD bersama masing-masing pengelola usaha dengan mengedepankan komunikasi. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Koordinasi antar lini dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Koordinasi antar lini dalam KUD Tunas Mukti baik antar pengelola usaha dengan pengurus maupun dengan badan pengawas sudah berjalan sesuai dengan diharapkan. Koordinasi ini dibawah kendali sekretaris KUD bersama masing-masing pengelola usaha dengan mengedepankan komunikasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan Mulyono selaku pengelola unit Pasar KUD Tunas Mukti mengenai membuat rencana kerja memberikan pernyataan bahwa: Koordinasi antar lini dalam KUD Tunas Mukti baik antar pengelola usaha dengan pengurus maupun dengan badan pengawas sudah berjalan sesuai dengan diharapkan.

Koordinasi ini dibawah kendali sekretaris KUD bersama masing-masing pengelola usaha dengan mengedepankan komunikasi. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Koordinasi antar lini dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan sebagaimana diharapkan. Koordinasi antar lini dalam KUD Tunas Mukti baik antar pengelola usaha dengan pengurus maupun dengan badan pengawas sudah berjalan sesuai dengan diharapkan. Koordinasi ini di bawah kendali sekretaris KUD bersama masing-masing pengelola usaha dengan mengedepankan komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan penggerakan. Di mana penggerakan penting untuk diperhatikan, sehingga penempatan orang-orang dalam pengurus dan pengelola koperasi merupakan orang-orang yang telah sesuai bidangnya, sehingga pencapaian tujuan koperasi akan semakin baik. Dengan demikian dari indikator penggerakan dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (Controlling) dalam penelitian ini adalah tindakan koreksi yang dilakukan untuk menilai pengelolaan usaha yang dijalankan pengurus koperasi.

1). Pengawasan langsung

Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti mengenai pengawasan langsung memberikan pernyataan bahwa: Pengawasan yang ada dalam KUD Tunas Mukti diawasi langsung oleh anggota dan diwakilkan oleh Badan Pengawas. Selain itu semua anggota KUD turut berperan dalam mengawasi pengelolaan KUD. Bentuk pengawasan langsung yang dilakukan adalah Monitoring laporan yang waktu pengawasannya setiap saat dan setiap jam kerja. Tim pengawas selalu melakukan pengawasan pada saat jam kerja berlangsung (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan pengawasan langsung sebagai bentuk kontrol dari bagian yang berwenang dalam memastikan aktivitas koperasi berjalan sebagaimana diharapkan. Pengawasan yang ada dalam KUD Tunas Mukti diawasi langsung oleh anggota dan diwakilkan oleh Badan Pengawas. Selain itu semua anggota KUD turut berperan dalam mengawasi pengelolaan KUD. Bentuk pengawasan langsung yang dilakukan adalah Monitoring laporan yang waktu pengawasannya setiap saat dan setiap jam kerja. Tim pengawas selalu melakukan pengawasan pada saat jam kerja berlangsung.

Sementara dari hasil wawancara dengan 4 (empat) orang anggota KUD Tunas Mukti yakni Diwono, Rahmad, Rosun, dan Darobi dapat dirangkum mengenai pengawasan

langsung yakni: Kami sebagai anggota KUD Tunas Mukti memiliki hak dan kewajiban. Hak kami untuk melakukan pengawasan dan menerima laporan pertanggungjawaban dari pengelola koperasi serta mendapatkan SHU pada setiap akhir tahun/periode. Kewajiban kami menyetor iuran pokok dan membayar pinjaman (jika ada hutang dengan koperasi) (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

Dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti termasuk pada setiap unit usaha yang ada sudah dilakukan pengawasan langsung oleh badan pengawas koperasi dan anggota koperasi. Kami sebagai anggota KUD Tunas Mukti memiliki hak dan kewajiban. Hak kami untuk melakukan pengawasan dan menerima laporan pertanggungjawaban dari pengelola koperasi serta mendapatkan SHU pada setiap akhir tahun/periode. Kewajiban kami menyetor iuran pokok dan membayar pinjaman (jika ada hutang dengan koperasi).

2). Pengawasan tidak langsung

Hasil wawancara dengan Sofyan Ismoyo selaku Badan Pengawas KUD Tunas Mukti mengenai pengawasan tidak langsung memberikan pernyataan bahwa: Pengawasan tidak langsung yang dilakukan pengurus KUD Tunas Mukti terhadap pengelola usaha adalah dengan cara dilihat hasil kerja dan bentuk laporan yang disampaikan. (Wawancara pada tanggal 26 Juni 2023)

KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan pengawasan tidak langsung oleh badan pengawas dan anggota koperasi dalam bentuk LPJ. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan pengurus KUD Tunas Mukti terhadap pengelola usaha adalah dengan cara dilihat hasil kerja dan bentuk laporan yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan pengawasan. Pengawasan merupakan tindakan untuk melakukan pengawasan atas semua aktivitas yang terjadi dalam organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk evaluasi untuk melihat kesesuaian antar rencana dan realita yang terjadi pada aktivitas organisasi. Untuk itu indikator pengawasan dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti sudah berjalan dengan baik.

Dengan demikian dari 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan KUD Tunas Mukti telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga melalui usaha yang dijalankan KUD Tunas Mukti mampu menyejahterakan anggota. Hasil ini dilihat dari Perencanaan yang dilakukan dengan membuat rumus rencana kerja, target kerja, dan menetapkan hasil yang hendak dicapai dalam setiap tahunnya. Pengorganisasi dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti dijalankan dengan menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari masing-masing bagian serta menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam

menjalankan aktivitas organisasi. Penggerakan dengan melakukan penempatan orang-orang dalam pengurus dan pengelola koperasi yang tepat serta memiliki kemampuan sesuai bidangnya. Pengawasan dalam organisasi telah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh semua bagian dari KUD Tunas Mukti.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti yakni dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni pengurus yang kurang kreatif untuk mengembangkan dan mengelola dana yang ada, sehingga dana KUD banyak yang mengendap. Sementara faktor eksternal dari anggota KUD banyak yang kurang komitmen dengan tanggungjawabnya untuk melakukan setoran pokok dan pembayaran pinjaman. Selain itu masih adanya anggota koperasi yang kurang mendukung usaha koperasi seperti berbelanja di Waserda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan KUD Tunas Mukti telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga melalui usaha yang dijalankan KUD Tunas Mukti mampu memberikan hasil bagi anggota. Hasil ini dilihat dari 4 (empat) indikator yang menjadi tolak ukur penelitian. 1) Perencanaan dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilakukan pengurus. 2) Pengorganisasi dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti telah dilaksanakan dengan menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari masing-masing bagian serta menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan. 3) Penggerakan dengan melakukan penempatan orang-orang dalam pengurus dan pengelola koperasi yang tepat serta memiliki kemampuan sesuai bidangnya. 4) Pengawasan dalam organisasi telah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh semua bagian dari KUD Tunas Mukti.

Faktor penghambat dalam pengelolaan KUD Tunas Mukti berasal dari faktor internal (pengurus dan pengelola koperasi) kurang kreatif dalam memanfaatkan dana yang tersedia dan eksternal (berasal dari anggota koperasi) kurang maksimal memanfaatkan unit usaha yang ada dalam koperasi. Faktor pendukung, KUD Tunas Mukti telah diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Baswir, Revrison. 2010. Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Hamim, Sufian. 2015. Administrasi, Organisasi, dan Manajemen. Pekanbaru: UIR Press.
- Hamim, Sufian dan Indra Mukhlis Adnan. 2018. Organisasi, dan Manajemen. Krapyak Kulon: Trussmedia Grafika.
- Hasibuan, S.P Malayu. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Kasmir. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok. Rajagrafindo Persada
- Marwansyah. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta, Bandung.

- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Nugroho, Riant. 2013. *Public Polic*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafeii, Inu Kencana. 2016. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Terry, G.R. 2015. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*.

- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.

- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).

- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Bandung: Mandar Maju.
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2018. Manajemen. Yogyakarta: Mitra Cendikia
- Zulkifli dan Nurmasari, 2015. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Deasy Dwi Ratnasari, dkk. 2015. Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2015
- Maria Ira Susanti. 2015. Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) "Mitra Maju" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2015
- Sri Hantuti Paramata. 2015. Peran Koperasi Annisa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Publik : Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2015

Regulasi:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tenta